

ANALISIS INVESTASI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG PERIODE 2018- 2022

Lintang Pusvita Sari *¹
Tiara Salsabila ²
Sintya Maharani ³
Nazla Hanifa Zen ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

e-mail: lintangpusvitaa@gmail.com¹, tiarasalsabila198@gmail.com², sintyamaharani99@gmail.com³, nazlahanifazen28@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan investasi pemerintah dalam sektor pariwisata memiliki peran penting dalam pendapatan asli daerah serta dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pada Kabupaten Badung, banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam, seperti pantai yang menawan, serta untuk merasakan kekayaan kesenian tradisional yang khas. Semakin banyak wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata tersebut, semakin tinggi pula pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, dengan menggunakan data yang tercantum pada Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, (Bapenda) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Badung tahun 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, investasi pemerintah dalam sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung memiliki hasil yang fluktuatif, mencerminkan berbagai dinamika yang terjadi di sektor tersebut.

Kata kunci: Investasi Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Abstract

The development of government investment in the tourism sector plays a significant role in local revenue and in enhancing the regional economy. In Badung Regency, many tourists come to enjoy the natural beauty, such as the enchanting beaches, as well as to experience the unique traditional arts. The more tourists visit these attractions, the higher the local revenue generated. Local revenue is influenced by several factors, including local taxes, hotel taxes, restaurant taxes, and regional levies. This study aims to analyze the impact of the tourism sector on local revenue, using data listed by the Bali Central Statistics Agency (BPS), the Badung Central Statistics Agency (BPS), the Badung Regional Revenue Agency (Bapenda), and the Badung Regency Government (Pemkab) for the years 2018-2022. The method used in this research is descriptive quantitative. The results of this study indicate that over the past five years, government investment in the tourism sector has shown fluctuating results in relation to the local revenue of Badung Regency, reflecting the various dynamics occurring in the sector.

Keyword : Analysis, Cooperative, Liquidity Rasio, Solvency Rasio, Profitability Ratio

PENDAHULUAN

Perkembangan investasi pemerintah dalam sektor pariwisata pada daerah Bali mempunyai peranan yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi. Bali merupakan provinsi yang memiliki kekayaan keindahan alam dan budayanya, tidak hanya dengan keindahan dan budayanya saja. Bali memiliki kontribusi penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Bali menjadi destinasi wisata yang sering masuk kedalam list tempat wisata yang akan dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara ataupun domestik. Salah satu Kabupaten di Bali yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung mencakup kawasan wisata terkenal seperti Kuta dan Nusa Dua. Menurut Secara administratif, Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 km² atau 7,43% dari luas Pulau Bali. Wilayah utara Kabupaten Badung adalah daerah pegunungan dengan udara sejuk yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Bagian tengah kabupaten ini terdiri dari persawahan dengan pemandangan asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah timur. Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan, sementara bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Kombinasi ini menjadikan Kabupaten Badung sebagai daerah yang kaya akan keindahan alam dan potensi pariwisata. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung untuk menikmati keindahan pantai serta kesenian tradisional dan juga keramahan penduduk lokal. Kehadiran wisatawan ini menjadikan peningkatan dalam kegiatan perekonomian seperti penginapan atau hotel, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi, dan kesenian. Impact yang terjadi dengan adanya wisatawan ini berdampak pada pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung dikarenakan adanya virus COVID-19. Adanya pandemi ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan itu pentingnya analisis strategi yang tepat dalam meningkatkan kestabilan pendapatan asli daerah (PAD). Menggunakan data-data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung diharapkan dapat menemukan hubungan antara peningkatan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat mengoptimalkan sektor pariwisata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Badung.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah (Wulandari et al., 2021). Pajak hotel merupakan jenis pajak yang semakin bertumbuh dengan bertambahnya jumlah wisatawan dan jumlah pengunjung tempat wisata (Amin, 2023). Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas fasilitas pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut (Adisty, 2022). Menurut Mardiasmo dalam (Damaryanti, 2021) Retribusi daerah merupakan biaya yang dikenakan atas pemberian izin atau jasa oleh pemerintah daerah atas suatu perkumpulan atau individu.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan mencatat, mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta menganalisis data keuangan dan dapat membuat laporan keuangan suatu usaha dari yang swasta maupun publik. Tujuan dari proses ini adalah memberikan pengetahuan mengenai keuangan yang dibutuhkan pihak-pihak tertentu. Laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki sifat yang mudah dipahami oleh berbagai pihak (Belinda 2021).

Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah merupakan alokasi keuangan atau dana yang digunakan untuk menaikkan kapasitas dalam melayani masyarakat serta mendapatkan manfaat lain yaitu royalti, bunga, dan dividen (Sugiyanto, 2020). Investasi pemerintah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dengan itu pemerintah harus mengembangkan atau membuat inovasi yang baik dalam menggunakan investasi untuk meningkatkan perekonomian (Dira et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo dalam (Pratiwi, 2022) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sudah dibagi, dan dari pendapatan daerah yang lain. Pendapatan asli daerah dapat disebut sebagai kemampuan yang dimiliki daerah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien.

Pajak Daerah

Menurut (Simbolon & Herijawati, 2023) Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan lain sebagainya.

Wisatawan

Menurut Kustini dalam (Miranda, 2021) Wisatawan merupakan individu atau kelompok yang mendatangi sebuah lokasi untuk sementara waktu dan tidak menetap. Dalam wisatawan terdapat tiga bagian yaitu pengunjung yang memiliki tempat tinggal di sebuah lokasi dan memiliki kepentingan seperti bekerja pada lokasi tersebut, wisatawan yang merupakan pendatang yang berkunjung dalam waktu lebih dari sehari atau 24 jam, dan darmawisata pendatang yang berkunjung tidak lebih dari 24 jam termasuk orang yang berada dikapal. Wisatawan mancanegara merupakan wisatawan yang datang dari negara luar untuk berwisata, sedangkan wisatawan domestik merupakan wisatawan dari dalam negara yang berkunjung untuk berwisata.

Objek wisata

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang baru, memiliki kualitas tinggi, dan mempunyai beragam aspek kekayaan budaya, serta produk buatan manusia yang menarik dan dapat menarik wisatawan Menurut Ridwan dalam (Haki et al. 2021). Objek wisata di Kabupaten Badung yaitu Pantai Pandawa merupakan pantai yang terdapat di Desa Kutuh, Pantai Tegal Wangi merupakan pantai yang terdapat di Desa Adat, Air Terjun Nungnung merupakan air terjun yang terdapat di Belok atau Sidang, Taman Ayun Temple yang berada di Desa Mangawi, dll.

Sarana akomodasi

Sarana akomodasi merupakan suatu tempat yang dijadikan tempat bersinggah oleh wisatawan untuk menuju ke lokasi objek wisata, seperti akomodasi hotel sebagai tempat untuk beristirahat serta tempat menaruh barang pribadi, tempat makan/restoran yang dipergunakan untuk mencari makanan tradisional, dan tempat belanja yang digunakan sebagai untuk membeli oleh-oleh barang atau makanan khas daerah tersebut (Manalu et al. 2023).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data atau fenomena yang ada tanpa memanipulasi variabel. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai karakteristik, kondisi, atau fenomena tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif melibatkan penggunaan angka sebagai dasar utama analisis. Dengan proses pengumpulan data yang sistematis, data dikumpulkan dalam bentuk numerik yang dapat dihitung. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang relevan.

Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada data sektor pariwisata kabupaten Badung Periode 2018-2022. Data-data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali www.bali.bps.go.id, Badan Pusat Statistik (BPS) Badung www.badungkab.bps.go.id, (Bapenda) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung www.bapenda.badungkab.go.id, dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Badung www.badungkab.go.id akan dianalisis secara mendalam oleh peneliti.

Populasi dan Sampel

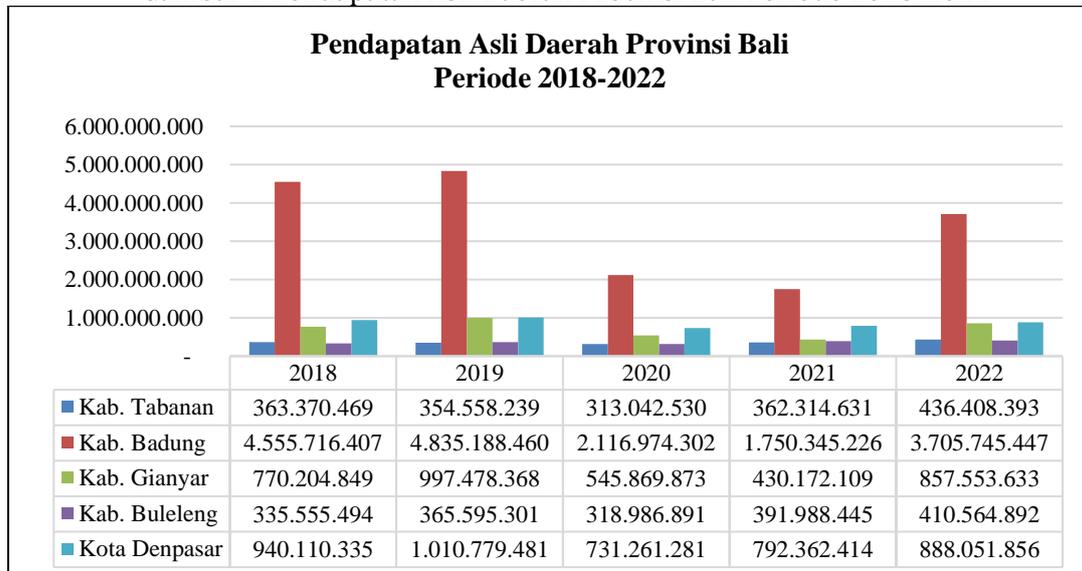
Populasi dalam penelitian ini mencakup semua data pariwisata Kabupaten Badung. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah sarana akomodasi, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung selama periode 2018-2022.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data yang dijelaskan oleh peneliti, digunakan teknik observasi non partisipan. Teknik observasi non-partisipan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati subjek atau fenomena tanpa ikut serta atau terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Dalam teknik ini, peneliti bertindak sebagai pengamat pasif dan tidak mempengaruhi situasi atau perilaku subjek yang sedang dipelajari. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, (Bapenda) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Badung tahun 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2018-2022



Sumber: www.bali.bps.go.id data diolah

Grafik di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa kabupaten/kota di Bali untuk periode 2018-2022. Kabupaten Badung menunjukkan performa PAD yang luar biasa, konsisten menduduki posisi teratas selama lima tahun berturut-turut. Keunggulannya terbilang signifikan, dengan selisih PAD daerah lain. Pada tahun 2018, PAD

Kabupaten Badung 384,59% lebih besar dari Kota Denpasar yang menempati urutan kedua dan 1.257,66% lebih besar dari Kabupaten Buleleng yang menempati urutan terakhir. Pada tahun 2019, PAD Kabupaten Badung masih mencatat keunggulan 378,36% dari Kota Denpasar, hal ini mengalami sedikit penurunan (6,23%) PAD dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, selisih PAD dengan Kabupaten Tabanan yang menempati urutan terakhir tahun 2019 semakin melebar, mencapai 1.263,72%. Tahun 2020 menjadi titik balik dengan merebaknya pandemi Covid-19. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai PP No. 21 Tahun 2020 berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan berakibat pada penurunan PAD Kabupaten Badung. Penurunan ini mencapai (17,32%) di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Menjelang akhir tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, secercah harapan muncul dengan meningkatnya cakupan vaksinasi dan dimulainya pelonggaran pembatasan kepada wisatawan yang ingin berlibur dengan sudah wajib vaksin. Hal ini membuka peluang bagi kebangkitan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Hal ini mendorong pemulihan ekonomi dan berimbas pada peningkatan PAD Kabupaten Badung sebesar 111,72% dibandingkan tahun 2021. Meskipun menunjukkan tren positif, pemulihan ini masih perlu diawasi dan diupayakan agar lebih berkelanjutan.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Periode 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.979.640.281,88	1.750.289.219.056,68	3.705.745.447.378,11
Pajak Daerah	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,10	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76
Retribusi Daerah	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	65.061.615.365,10	41.975.477.313,00	76.235.413.191,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	195.080.445.483,35	222.922.858.629,69	238.876.929.298,50

Sumber: www.badungkab.go.id data diolah

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagian besar PAD Kabupaten Badung berasal dari Pajak Daerah. Kabupaten Badung terkenal dengan banyaknya objek wisata dan sarana akomodasi yang tersebar luas, sehingga PAD Kabupaten Badung sebagian besar diperoleh dari pajak sektor pariwisata. Pajak daerah memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan daerah, karena pajak daerah memberikan kontribusi tertinggi pada PAD. Tanpa pajak daerah, kebutuhan dana untuk pembangunan daerah akan sulit diatasi. Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah dapat diinvestasikan kembali ke dalam sektor pariwisata, seperti pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan akomodasi dan layanan, promosi objek wisata, pelestarian budaya dan alam, serta penyelenggaraan acara festival budaya untuk menarik pengunjung, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan kontribusi Pajak daerah sebesar 8,89% terhadap PAD pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan efektivitas upaya pemungutan pajak dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan drastis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD masing-masing (61,74%) dan (20,76%), penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan pembatasan sosial. Pada tahun 2022, terlihat adanya pemulihan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 151,09%. Hal ini disebabkan oleh dimulainya program vaksinasi dan pelonggaran pembatasan yang mendorong aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Tabel 2 Pajak Daerah Periode 2018-2022

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Parkir
2018	2.236.311.260.005,09	624.456.631.009,54	80.288.902.447,10	24.704.858.685,00
2019	2.469.152.695.978,09	739.355.217.168,38	108.089.989.753,20	27.467.823.360,00
2020	670.803.265.683,85	255.065.894.487,66	35.572.211.795,58	12.242.978.980,25
2021	258.041.477.940,62	155.470.551.715,70	15.128.075.387,25	8.046.343.065,75
2022	1.514.286.925.145,92	533.985.223.266,63	70.368.248.660,28	22.755.135.575,50
Total	7.148.595.624.753,57	2.308.333.517.647,91	309.447.428.043,41	95.217.139.666,50

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Air Tanah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2018	2.339.863.129,00	137.523.792.755,00	63.502.870.562,24	40.867.000,00
2019	2.743.783.063,03	147.730.527.873,00	73.465.265.502,53	19.873.924.369,60
2020	888.400.639,09	117.079.252.250,00	40.293.440.694,92	49.545.000,00
2021	752.235.350,64	95.167.537.647,00	30.595.286.483,64	14.610.000,00
2022	2.894.645.660,09	126.834.594.974,00	48.483.353.218,72	63.975.000,00
Total	9.618.927.841,85	624.335.705.499,00	256.340.216.462,05	20.042.921.369,60

Tahun	PBB P2	BPHTB	Total
2018	205.568.318.326,25	498.178.419.219,00	3.872.915.783.138,22
2019	208.324.758.792,00	421.115.407.326,35	4.217.319.393.186,18
2020	147.068.176.988,36	334.689.956.225,35	1.613.753.122.745,06
2021	170.296.962.037,37	545.206.716.074,00	1.278.719.795.701,97
2022	204.093.627.435,62	687.021.637.202,00	3.210.787.366.138,76
Total	935.351.843.579,60	2.486.212.136.046,70	14.193.495.460.910,20

Sumber: www.bapenda.badungkab.go.id data diolah

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2, dan BPHTB. Dikarenakan Kabupaten Badung terkenal sebagai pusat pariwisata dengan berbagai macam daya tarik yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan pemasukkan pajak daerah di sektor pariwisata. Pajak hotel merupakan yang tertinggi Kabupaten Badung selama periode 2018-2022 sebesar Rp7.148.595.624.753,57. Pajak restoran dengan nilai sebesar Rp2.308.333.517.647,91. Serta pajak hiburan sebesar Rp309.447.428.043,41.

Pada tahun 2019, pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 34,63%. Namun, situasi berubah drastis ketika pandemi Covid-19 dimulai pada awal tahun 2020. Pembatasan yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus, termasuk larangan seluruh kegiatan sosial berskala besar, memberikan dampak signifikan terhadap pajak daerah di sektor pariwisata, salah satunya adalah pajak hiburan yang mengalami penurunan tajam sebesar (67,09%). Pandemi ini memberikan dampak besar terhadap industri pariwisata, menyebabkan penurunan drastis pada perolehan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Penurunan ini berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 yang belum membaik menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pajak hiburan, dengan penurunan sebesar (57,47%). Namun, pada tahun 2022, seiring dengan mulai pulihnya situasi pandemi, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam pajak hiburan, yang melonjak sebesar 365,15%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang cukup kuat di sektor pariwisata dan hiburan setelah terpuruk akibat pandemi.

Tabel 3 Jumlah Sarana Akomodasi Periode 2018-2022

Tahun	Sarana Akomodasi		Jumlah	Persentase	
	Hotel	Restoran		Hotel	Restoran
2018	1.705	1.980	3.685	0,00%	0,00%
2019	1.752	965	2.717	2,76%	-51,26%
2020	1.752	885	2.637	0,00%	-8,29%
2021	1.973	935	2.908	12,61%	5,65%
2022	2.488	3.288	5.776	26,10%	251,66%

Sumber: www.badungkab.go.id data diolah

Gambar 2 Jumlah Wisatawan Periode 2018-2022



Sumber: www.badungkab.bps.go.id data diolah

Kabupaten Badung memiliki sejumlah besar hotel yang tersebar di berbagai wilayah wisata, tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga internasional. Keberadaan hotel-hotel berbintang dan fasilitas akomodasi lainnya yang memenuhi standar internasional turut berkontribusi besar terhadap tingginya penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah hotel yang ada di Kabupaten Badung. Pada tahun 2019, jumlah hotel meningkat sebesar 2,76% atau bertambah 47 unit dibandingkan tahun 2018. Tahun 2020 merupakan awal pandemi Covid-19. Jumlah unit hotel tetap sama seperti tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar (26,94%) atau menurun sebanyak 30.359 wisatawan.

Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun jumlah hotel meningkat signifikan sebesar 12,61%, atau bertambah 221 unit dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan *Work From Home* yang membuat sebagian orang memilih bekerja dari hotel (*staycation*). Selain itu, hotel-hotel juga digunakan sebagai tempat karantina mandiri (*self-quarantine*) bagi mereka yang terinfeksi Covid-19. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung mengalami penurunan lebih lanjut menjadi sebesar (48,09%) atau menurun sebanyak 39.596 wisatawan karena masih merebaknya virus Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah hotel meningkat pesat sebesar 26,10% atau bertambah 515 unit dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung sebesar 948,04% atau bertambah sebanyak 405.203 wisatawan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pelonggaran pembatasan bagi wisatawan yang sudah divaksin, sehingga lebih banyak orang yang mulai kembali berlibur dan menginap di hotel. Dengan adanya pelonggaran pembatasan, industri pariwisata di Kabupaten Badung mulai bangkit kembali, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan penerimaan pajak dari sektor pariwisata.

Di sisi lain, restoran di Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Restoran menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi wisatawan serta penduduk lokal, menyediakan berbagai pilihan kuliner yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi daerah. Selain itu, restoran-restoran di Kabupaten Badung sering kali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang untuk menikmati kelezatan makanan khas Bali dan hidangan internasional yang disajikan dengan sentuhan lokal.

Pada tahun 2019, jumlah unit restoran di Kabupaten Badung mengalami penurunan drastis sebesar (51,26%), yang berarti ada penurunan sebanyak 1.015 unit. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Badung sebesar (73,80%), atau sebanyak 317.390 wisatawan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap jumlah restoran di Kabupaten Badung, dengan penurunan sebesar (8,29%) atau berkurang sebanyak 80 unit. Penurunan jumlah restoran ini tidak hanya mempengaruhi industri pariwisata, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal secara keseluruhan. Restoran yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi terpaksa berkurang. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah unit restoran sebesar 5,65% atau bertambah sebanyak 50 unit, meskipun jumlah kunjungan wisatawan masih mengalami penurunan sebesar (48,09%). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan dan adaptasi dari pelaku usaha restoran dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi.

Pada tahun 2022, jumlah restoran meningkat drastis sebanyak 251,66% atau bertambah 2.353 unit restoran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya kebijakan pelonggaran pembatasan sosial, meningkatnya kembali jumlah kunjungan wisatawan, serta upaya revitalisasi ekonomi lokal yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap keamanan dan kesehatan juga berkontribusi pada pertumbuhan signifikan sektor restoran di Kabupaten Badung. Upaya promosi pariwisata dan program vaksinasi yang masif turut mendukung kebangkitan industri ini, membuat Kabupaten Badung kembali menjadi destinasi kuliner yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

KESIMPULAN

Kabupaten Badung menunjukkan performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luar biasa selama periode 2018-2022, meskipun menghadapi tantangan signifikan akibat pandemi Covid-19. PAD Kabupaten Badung sebagian besar berasal dari pajak daerah, khususnya pajak sektor pariwisata, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan, yang memberikan kontribusi terbesar. Pada tahun 2018 hingga 2019, PAD Kabupaten Badung konsisten tinggi dengan peningkatan yang signifikan, menunjukkan efektivitas pemungutan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 menyebabkan penurunan drastis pada PAD, terutama dari sektor pariwisata, karena pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Tahun 2022 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan adanya pelonggaran pembatasan dan peningkatan cakupan vaksinasi, yang mendorong kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi lokal. Peningkatan signifikan dalam jumlah hotel dan restoran, serta kunjungan wisatawan, berkontribusi pada pemulihan PAD Kabupaten Badung. Meskipun tren pemulihan positif, upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisty, M. F. (2022). Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bone Hingga Transisi Menuju The New Normal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8-24.

- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Damaryanti, W. (2021). Efektifitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 45–60. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1299>
- Dira, A. F., Utomo, K. P., Bangun, M. F. A., Pramularso, E. Y., & Syarief, F. (2023). Pengaruh Investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1437–1446–1437–1446. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/4181>
- Haki, A. Y., . S., & Budiarto, A. E. (2021). Implementasi Metode Smart Pada Sistem Pendukung Keputusan Objek Wisata Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Kurawal - Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 4(2), 82–91. <https://doi.org/10.33479/kurawal.v4i2.458>
- Masni, N., Manalu, B., Simbolon, R., Silalahi, M., Tua, R. J., & Sinambela, M. (2023). *JMPP+Vol+1+no+4+November+2023+hal+197-213*. 1(4).
- Miranda, M. A. (2021). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pariwisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang. *Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta*, 2021, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Pratiwi, J. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Bakorwil I Madiun*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52–62.
- Sugiyanto, H. (2020). Analisis Investasi Pemerintah Pusat Pada Lembaga Keuangan Internasional. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 179–187. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.162>
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.